

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian ini. Pembahasan ini digunakan sebagai panduan dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang ada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kemiskinan, Tenaga Kerja Formal, dan Upah Minimum Provinsi.

2.1.1. Kemiskinan

2.1.1.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan adalah masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan terhadap ekonomi, sosial budaya dan partisipasi di masyarakat. Beragam bentuk kemiskinan dan banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program yang telah diupayakan masih belum efektif dalam mengatasi kemiskinan, hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang cenderung mengalami kenaikan dari masa ke masa. Noorikhsan & Gunawan (2022), mendefinisikan kemiskinan dalam pandangan yang berbeda, untuk melihat kemiskinan melalui dua pendekatan yang berbeda, pendekatan ekonomi yang berfokus pada identifikasi pendapatan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan minimal, dan pada sisi lainnya pendekatan sosial yang hanya berfokus pada pemenuhan secara materi, tetapi mencakup kemampuan dalam ikut berpartisipasi secara optimal sebagai anggota masyarakat.

Pendekatan sosial dilakukan pada dasar prinsip moral, bahwa setiap individu harus dapat memanfaatkan secara maksimal beragam sumber yang ada untuk mengembangkan kapasitas diri dan mencapai kepuasan untuk kehidupan yang produktif. Berdasarkan penjelasan Handler dan Hasenfeld di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan terdiri dari dua konsep, yaitu konsep ekonomi yang mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, dan konsep sosial yang mengacu pada minimnya kapasitas seseorang untuk menjalankan fungsi sosial dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Haughton & Khandker (2009), dalam *World Bank*, menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan deprivasi kesejahteraan. Secara konvensional menyatakan bahwa sejahtera pada dasarnya terjadi jika dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup, maka dari itu orang miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup hidup secara layak.

Kemiskinan yang digambarkan dalam *World Bank*, mencakup konteks yang lebih luas, karena menggunakan terminologi kesejahteraan. Seseorang dikatakan miskin tidak terbatas mengacu pada ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, namun kemiskinan kemiskinan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kapabilitas individu yang rendah dan ketidakberfungsian dalam bersosial. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakberuntungan.

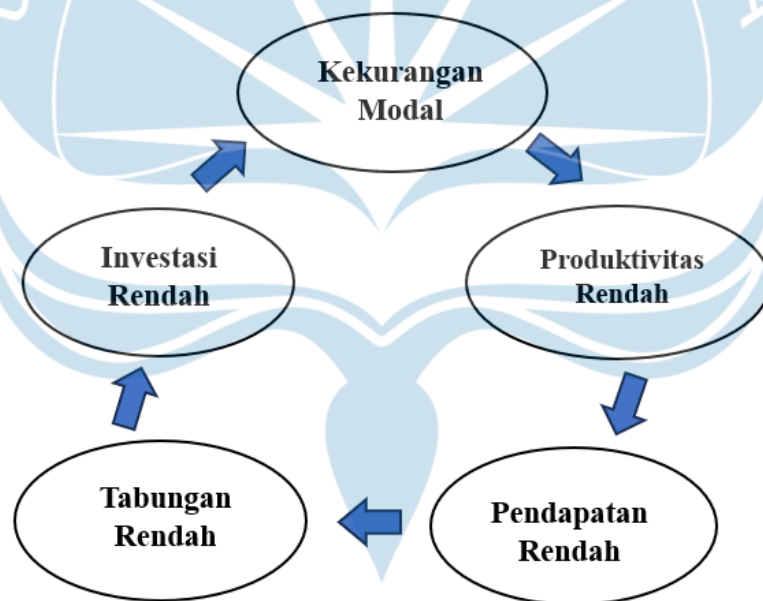
Menurut Putriana (2012), ada lima unsur perangkat kemiskinan, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan. Chambers menyimpulkan bahwa masyarakat miskin pada umumnya ditandai dengan ketidakberdayaan (*powerless*) untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, melakukan usaha yang produktif, menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi, menentukan nasib diri sendiri, dan membebaskan diri dari budaya dan mental miskin.

2.1.1.2. Teori Kemiskinan

Sharp (1996) dalam bukunya Kuncoro (1997), menyebutkan bahwa ada tiga teori kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, pertama, kemiskinan bisa diketahui melalui sisi perekonomian kecil, dimana penyebab kemiskinan terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk kemiskinan yang memiliki kualitas yang rendah sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Kedua, melalui sisi sumber daya manusia, sumber daya manusia yang rendah tidak layak mendapatkan peluang pekerjaan yang layak. Ketiga melalui sisi modal sebab penduduk yang tidak memiliki pendapatan yang masih relatif rendah, tidak memiliki modal untuk bisa memulai suatu usaha untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Sharp diatas adanya tiga penyebab dari kondisi kemiskinan memunculkan teori lingkaran setan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), dalam buku Kuncoro (1997), menyatakan “a

poor country is poor” atau “ Negara itu miskin dikarenakan dia miskin”. penyebab kemiskinan diatas ini bermuara dari teori lingkaran kemiskinan. Terjadinya keterbelakangan, kesitidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas. Akibat dari rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah yang rendah. Rendahnya pendapatan akan berpengaruh pada rendahnya kemampuan dalam menabung dan melakukan investasi. Rendahnya kemampuan dalam menabung dan berinvestasi menyebabkan rendahnya kesempatan kerja sehingga menaikkan jumlah pengangguran.



Sumber: Kuncoro (1997)

Gambar 2. 1
Lingkaran Kemiskinan

2.1.1.3. Macam-macam Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004), adapun macam-macam kemiskinan antara lain:

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang yang termasuk dalam golongan kemiskinan absolut jika seseorang tersebut tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai keberlangsungan hidup yang baik, seseorang tersebut dapat disebut sebagai penduduk miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang yang termasuk dalam golongan kemiskinan relatif jika seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi disebabkan tatanan sosial budaya atau politik yang secara pasif mendukung pembebasan kemiskinan.

4) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural terjadi akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang yang pada umumnya berasal dari kebudayaan yang ada yang tidak mau memperbaiki taraf hidup modern.

2.1.1.4. Ukuran Kemiskinan

Menurut *World Bank* (2002), Untuk dapat mengetahui jumlah penduduk miskin, dibutuhkan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga kebijakan dan program kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dapat berjalan secara efektif. Pengukuran kemiskinan merupakan instrument untuk melakukan evaluasi untuk dapat membandingkan kemiskinan antar waktu dan untuk mengurangi kemiskinan.

Metode perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dengan pendekatan ini kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan tersebut indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase dari penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan.

Menurut *World Bank* (2002), indikator kemiskinan terdiri dari kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, adanya perbedaan sumber daya manusia, sektor ekonomi yang terbatas, rendahnya produktivitas, budaya hidupnya yang kurang baik, dan pengelolaan sumber daya yang tidak baik.

Menurut SMERU (2001), dimensi kemiskinan antara lain:

1. Ketidakmapuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan.
2. Sulitnya akses untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan
3. transportasi.
4. Tidak adanya jaminan bagi masa depan dikarenakan tidak mempunya dalam bervestasi dalam pendidikan dan keluarga.
5. Rentannya terhadap guncangan yang bersifat individual ataupun massal.
6. Rendahnya kualitas pada sumber daya manusia
7. Terbatasnya sumber daya alam
8. Rendahnya aktivitas di dalam masyarakat.
9. Sulitnya akses dalam lapangan pekerjaan.
10. Ketidakmapuan dalam berusaha dikarenakan cacat fisik maupun mental.
11. Ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, janda miskin, kekerasan di dalam rumah tangga.

2.1.2. Ketenagakerjaan

2.1.2.1. Pengertian tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah termasuk dalam usia kerja.

Dalam Undang Undang No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 dijelaskan

bahwa tenaga kerja adalah mereka yang dapat bekerja agar dapat menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.

Menurut Simanjuntak dalam Rustiono (2008), Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun, sedangkan yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja. Defensisi tenaga kerja bersifat terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, hanya penduduk yang sudah mencapai usia minimum yang dapat disebut sebagai tenaga kerja. Usia 14 tahun (remaja) keatas yang memiliki pekerjaan tertentu di dalam suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja, sebenarnya tidak termasuk dalam angkatan kerja dikarenakan mereka masih melakukan aktifitas bersekolah, dan juga wanita yang mengurus rumah tangga atau orang dalam keadaan bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan tidak dikatakan sebagai angkatan kerja.

Sedangkan menurut Simanjuntak & Rahmadi (2016), definisi tenaga kerja adalah orang yang sudah bersedia dan sanggup bekerja, termasuk juga mereka yang sedang menganggur dikarenakan tidak adanya kesempatan kerja. Oleh karena itu mereka yang sudah mencapai usia pensiun biasanya masih harus tetap bekerja, sehingga mereka masih tetap digolongkan sebagai tenaga kerja

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang dalam usia produktif yang dapat melakukan suatu pekerjaan baik yang sudah bekerja, yang tidak sedang bekerja, dan melakukan

kegiatan selain bekerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang penting dalam kegiatan produksi.

2.1.2.2. Penyerapan tenaga kerja

Menurut Kuncoro dalam Fadliilah & Atmanti (2012), penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari lapangan kerja yang sudah terisi yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang sudah bekerja atau angkatan kerja yang sudah bekerja.

Menurut Pratomo (2017), Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi dapat dilihat dari banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang sudah bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dapat juga dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Setiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda maka setiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menyebabkan dua hal, yaitu:

1. Perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor
2. Secara berangsur-angsur akan terjadi perbedaan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja ataupun kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Tenaga kerja yang tersedap tersebar dalam berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja pada umumnya menghasilkan jasa yang lebih besar. Laju pertumbuhan setiap sektor berbeda. Dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha. Maka penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

2.1.2.3. Tenaga kerja sektor Formal

Menurut Tanigia (2018), tenaga kerja formal merupakan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Tenaga kerja formal memperoleh perlindungan dari hukum yang kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada di dalam organisasi yang memiliki badan hukum. Sedangkan tenaga kerja informal adalah pekerja yang bertanggung Jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan kesepakatan saja.

Menurut BPS, tenaga kerja formal adalah mereka yang status pekerjaannya adalah sebagai buruh, karyawan, pegawai dan berusaha dibantu oleh upah tetap. Tenaga kerja sektor formal memiliki permasalahan yang cenderung lebih rendah atau bahkan tidak ada, berbeda halnya dengan tenaga kerja informal, tenaga kerja informal yang bekerja pada pihak perseorangan yang tidak memiliki badan hukum resmi, sehingga lebih rentan mengalami masalah.

2.1.3. Upah Minimum

2.1.3.1. Pengertian Upah Minimum

Sumarsono dalam Sulistiawati *et al.* (2012), mendefinisikan upah sebagai hasil balas jasa yang berupa imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas hasa atau pekerjaan yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang sudah ditetapkan atau disetujui berlandaskan peraturan perundang-undangan atas suatu kesepakatan yang sudah disepakati antara pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan baik bagi karyawan maupun keluarganya.

Menurut Simanjuntak dalam Riva *et al.* (2014), Kebijakan upah minimum adalah sistem pengupahan yang sudah diterapkan oleh banyak negara, yang dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, upah minimum sebagai alat proteksi bagi para pekerja dalam mempertahankan agar nilai upah tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, upah minimum sebagai alat proteksi bagi perusahaan dalam mempertahankan produktivitas para pekerja.

2.1.4. Teori upah Malthus

Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economics*). Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dengan sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini akan menekan tingkat upah, sebaliknya secara simetris tingkat upah akan naik apabila penduduk berkurang. Sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Asumsi lain usaha untuk menaikkan tingkat upah

dalam jangka panjang, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Jadi dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan tingkat jumlah penduduk (Afrida, 2007).

Jumlah penduduk terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya di menangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Sulistiawati, 2012).

2.1.5. Teori Upah David Ricardo

Dalam teori David Ricardo mengatakan ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Jika penyerapan tenaga kerja ini dikaitkan dengan upah minimum regional (UMR), maka dapat diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan negatif upah dengan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah upah akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran industri yang akan menurunkan besaran laba optimum industri tersebut. Tentunya ini akan menghambat industri untuk berkembang, untuk

mengatasi permasalahan tersebut tidak jarang suatu industri harus menenpuh dengan cara pengurangan tenaga kerja atau Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) hal ini dilakukan semata-mata untuk menghemat pengeluaran dan demi tercapainya laba optimum sektor industri tertentu (Purnami, 2014).

2.1.6. Jenis Upah

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/men/1999 tentang upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah imbalan setiap bulan yang tidak disesuaikan pada tingkat kehadiran atau capaian prestasi.

Upah Minimum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Upah minimum regional, yaitu upah pokok serta tunjangan bagi para pekerja tingkat paling bawah yang bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.
2. Upah Minimum sektoral, yaitu upah minimum yang berlaku pada suatu provinsi sesuai kemampuan sektor tersebut.

Kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 2002 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

1. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Upah minimum diterapkan berdasarkan:
 - a) berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota

- b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, upah sektoral ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
3. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota.
4. Pengusaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum akan dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2.2. Studi Terkait

Penelitian dilakukan oleh Dewi *at al.* (2020), tentang dampak pandemi covid terhadap tenaga kerja formal di Indonesia, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran tenaga kerja formal yang besar mencerminkan bahwa gejolak pada pasar tenaga kerja formal dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi yang dapat dilihat tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja formal mampu menurunkan kemiskinan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis terdukung.

Penelitian yang dilakukan Riva *et al.* (2014), mengkaji tentang pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Riau. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik maupun brosur-brosur serta buku referensi dan kepustakaan yang dianggap relevan, penelitian ini mengambil data tahunan yang meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan metode linear regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel *independent* dan variabel *dependent*. Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for windows* versi 17.0. Hasil analisis data yang telah dilakukan, variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dan variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terdukung.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ansori & Priyono (2018), penelitian ini mengkaji tentang penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2009-2015. Untuk melihat besarnya pengaruh antara penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja dengan jumlah kemiskinan yang diserap digunakan metode regresi sederhana. Hasil dari analisis data yang

telah dilakukan menunjukkan variabel penyerapan tenaga kerja dan upah minimum pekerja di Provinsi Jawa Timur memiliki koefisien positif dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tingkat keyakinan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyerapan tenaga kerja dan kebijakan dari pemerintah akan naiknya jumlah kemiskinan karena sangat signifikan pengaruhnya terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Timur. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terdukung.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari (2021), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010-2019 di Provinsi Jawa Tengah. Faktor pengaruh tersebut akan dibahas berlandaskan pada tinjauan pengertian kemiskinan yang meliputi penyebab, ukuran dan indikator kemiskinan. Kemudian akan diukur berlandaskan tingkat pengangguran, yang memperhitungkan adanya jenis pengangguran, dampak pengangguran, upah minimum dan jumlah kependudukan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dengan data *time series*. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis berganda dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan SPSS 25.5 *for windows*. Melalui penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi

Jawa Tengah serta jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Maka dapat disimpulkan hipotesis terdukung.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Febrianica (2015), yang mengkaji tentang dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pekerja yang tergolong miskin di Indonesia dan untuk mengetahui dampak kebijakan upah minimum terhadap probabilitas pekerja yang tergolong miskin atau tidak miskin di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dan variabel independennya adalah upah minimum, lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan terakhir, dan sektor pekerjaan (pertanian, perdagangan dan jasa). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Sakernas tahun 2012, dan data tersebut dianalisis menggunakan analisis model regresi respons kualitatif dan analisis datanya menggunakan model probit.

Hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menunjukkan bahwa pekerja yang tergolong miskin di Indonesia memiliki karakteristik berada dalam usia lebih dari 66 tahun, memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bekerja pada sektor pertanian dan jasa dan tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa yang memiliki kecenderungan termasuk dalam golongan miskin adalah variabel lokasi tempat tinggal, sektor pekerjaan pertanian, sektor pekerjaan perdagangan dan sektor pekerjaan jasa karena memiliki koefisien positif dan signifikan. Sedangkan yang memiliki kecenderungan untuk tergolong tidak

miskin adalah variabel upah minimum, umur pekerja, tingkat pendidikan terakhir SMP, tingkat pendidikan terakhir SMA dan tingkat terakhir Universitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terdukung.

